©2024 by author(s)
Vol. 8, No. 2, pp. 314-333.
DOI: 10.32787/ijir.v8i2.572

PERDAGANGAN SATWA LIAR ASIA TENGGARA DALAM RANTAI NILAI INDUSTRI OBAT TRADISIONAL TIONGKOK

Southeast Asian Wildlife Trade in The Value Chain of China's Traditional Medicine Industry

Sri Reski Amalia
Universitas Airlangga
Surabaya, Indonesia
sri.reski.amalia-2022@fisip.unair.ac.id

INFO ARTIKEL
Article History

Received
24 May 2024

Revised
30 July 2024

Accepted
31 July 2024

Keywords:
golden triangle; illegal trade; Southeast Asia; traditional Chinese medicine; wildlife.

Kata Kunci:
kawasan segitiga emas; perdagangan ilegal; Asia Tenggara; obat tradisional Tiongkok; satwa liar.

Abstract
This paper aims to explain the relationship between wildlife trade in Southeast Asia and the production of traditional Chinese medicine (TCM). The conceptual framework includes value chain trade, economic asymmetry, and laundering. The research method is qualitative through a literature review of scientific sources, including books, journals, and online articles. The results show that the Golden Triangle in Laos is the main gateway for illegal wildlife trade to China, managed by Kings Romans International Ltd. The Illegal business operates under a legally registered casino business to avoid international and national pressures. Subsequently, animals smuggled to China are processed into TCM and distributed to domestic and overseas markets. To legitimize the illegal components of TCM, pharmaceutical companies exploit national and international legal loopholes that are insufficient in addressing the trade of rare wildlife and derivatives.

Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara perdagangan satwa liar di Asia Tenggara dengan produksi obat tradisional Tiongkok (*traditional Chinese Medicine*/TCM). Kerangka konseptual meliputi perdagangan rantai nilai, asimetri ekonomi, dan pencucian satwa liar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui kajian pustaka terhadap sumber-sumber ilmiah, meliputi buku, jurnal, dan artikel daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Segitiga Emas di Laos merupakan pintu gerbang utama perdagangan satwa liar ilegal ke Tiongkok yang dikelola oleh Kings Romans International Ltd. Bisnis ilegal tersebut beroperasi di bawah bisnis kasino yang terdaftar secara resmi untuk menghindari tekanan internasional dan nasional. Selanjutnya, hewan yang diselundupkan ke Tiongkok diolah menjadi TCM dan didistribusikan ke pasar domestik dan luar negeri. Untuk melegitimasi komponen ilegal TCM, perusahaan farmasi memanfaatkan celah hukum nasional dan internasional yang tidak memadai dalam menangani perdagangan satwa liar langka dan turunannya.

ISSN: 2548-4109 electronic
ISSN: 2657-165X printed

PENDAHULUAN

Tulisan ini menunjukkan adanya interaksi antara tiga aktor globalisasi, yaitu negara, korporasi, dan kelompok kriminal yang mengaburkan batasan antara aktivitas perdagangan yang legal dan ilegal. Pembahasan terkait tata kelola rantai nilai obat tradisional Tiongkok atau *traditional Chinese medicie* (TCM) memiliki banyak elemen selain perbatasan yang memengaruhi cara kerja setiap aktor di dalamnya. '*Laundering'* (Uhm, 2018: 197) adalah istilah yang dapat menggambarkan bagaimana perusahaan farmasi di Tiongkok memanfaatkan celah hukum yang dibuat pemerintah untuk menyembunyikan asal-usul ilegal dari bahan pembuatan TCM yang diselundupkan dari kawasan lain, khususnya dari Asia Tenggara.

Tiongkok merupakan negara tujuan perdagangan satwa liar yang paling aktif sejak berabad-abad lalu melalui jalur sutra yang saat ini dibangun kembali di bawah inisiatif *Belt Road Initiative* (BRI). Untuk memahami alasan dominasi Tiongkok dalam perdagangan satwa liar, penting untuk melihat dari aspek geografisnya (Wong, 2019: 13). Tiongkok berdekatan dengan negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, khususnya di sepanjang Jalur Sutra, yaitu negara-negara Mekong seperti Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Kamboja (Jiao et al., 2021:1). Selama bertahun-tahun memanfaatkan satwa domestik untuk pembuatan TCM, populasi spesies satwa liar di Tiongkok semakin berkurang dan jumlah satwa dalam penangkaran sangat terbatas. Oleh sebab itu, kelompok kriminal transnasional melihat peluang tersebut untuk melakukan diversifikasi bisnis ke sektor perdagangan satwa liar. Pintu perdagangan ilegal tersebut terletak di Asia Tenggara dengan Kawasan Ekonomi Khusus Segitiga Emas di Laos merupakan gerbang utamanya.

Pihak yang beroperasi dalam perdagangan satwa liar merupakan bagian dari perusahaan yang terdaftar secara sah. Kawasan perbatasan Laos dikenal aktif dengan bisnis kasino yang dikelola oleh perusahaan Tiongkok yang berbasis di Hongkong, yaitu Kings Romans Internasional Ltd. Diketahui bahwa bisnis kasino tersebut terdaftar secara legal dan membawahi beberapa bisnis bawah tanah seperti jual beli narkoba, pencucian uang, dan perdagangan satwa liar. Dalam tulisannya, Chi (2021: 8) menyatakan bahwa kawasan istimewa rentan dengan aktivitas perdagangan gelap karena berada di luar wilayah pabean suatu negara. Kontrol hukum di kawasan tersebut lebih lemah di wilayah

lain sehingga menjadi lokasi yang ideal untuk menarik kelompok atau korporasi kriminal transnasional untuk beroperasi di dalamnya.

Asia Tenggara memiliki peran krusial dalam perdagangan ilegal karena merupakan sumber, pusat distribusi, dan transit untuk berbagai jenis aktivitas ekonomi ilegal, termasuk perdagangan satwa. Jenis-jenis satwa yang biasanya diburu di Asia Tenggara adalah harimau, trenggiling, dan badak. Namun aktivitas perburuan yang telah berlangsung lama menyebabkan ekspansi kawasan perburuan ke wilayah lain yang mampu menawarkan satwa liar dalam jumlah besar. Dalam hal ini, Asia Selatan dan Afrika memiliki nilai istimewa karena mampu mendistribusikan satwa liar untuk pembuatan TCM. Jalur transit untuk penyelundupan tersebut adalah Asia Tenggara, khususnya di Kawasan Segitiga Emas yang menjadi pusat perdagangan satwa liar spesies harimau dan trenggiling. Penting untuk diketahui bahwa pembentukan jaringan TCM umumnya didasarkan pada hubungan etnis, budaya, dan keluarga Tionghoa yang berada di perantauan (Uhm, 2019: 122). Hal tersebut mengilustrasikan pentingnya ikatan sosial yang terjalin sejak masyarakat Tiongkok bermigrasi ke negara-negara di sepanjang Jalur Sutra (Uhm & Wong, 2021: 491).

Inisiatif BRI yang disampaikan oleh Presiden Xi pada tahun 2013 berpotensi membuka celah yang lebih luas untuk melenggangkan aktivitas perdagangan ilegal di sepanjang Jalur Sutra. Seperti yang disampaikan oleh Wong (2019: 21), BRI memiliki dua mata pedang: di satu sisi menciptakan peluang kerja sama perdagangan, investasi, dan imigrasi antara negara anggota, namun di sisi lain membuka peluang bagi kejahatan transnasional dengan berbagai modus penyelundupan yang sulit ditangani. Megaproyek tersebut menciptakan koridor menuju pasar satwa liar sehingga diperlukan mekanisme hukum yang efektif untuk mendeteksi adanya aktivitas ilegal (Farhadinia et al., 2019).

Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) bertujuan untuk mencegah perdagangan lintas batas satwa liar yang dapat menyebabkan kepunahan secara ekonomi dan ekologis terhadap spesies satwa langka (Krishnasamy & Zavagli, 2020: 14). Sebagai negara yang menandatangani konvensi tersebut, Tiongkok menunjukkan komitmennya melalui implementasi peraturan pencegahan perdagangan ilegal

dalam kerangka multilateral ASEAN *Plus* China dan ASEAN *Plus Three.* Selain itu, negara yang dikenal aktif mengimpor satwa secara ilegal ini juga memiliki hukum nasional yang mengimplementasikan amanat dari CITES. Instrumen hukum tentang perlindungan satwa langka diterapkan dalam tiga tingkatan, yaitu undang-undang dan peraturan nasional, peraturan daerah, serta interpretasi legislatif dan yudikatif (Jiao et al., 2021: 7). Akan tetapi, meski telah mengadopsi konvensi internasional tentang perlindungan satwa ke dalam hukum nasionalnya, aturan tersebut masih menyisakan celah bagi perusahaan farmasi yang memproduksi TCM untuk melegalkan bahan ilegal dalam komposisi produknya.

Pandemi Covid-19 yang penanganannya menyebabkan pergerakan manusia menjadi terbatas tidak lantas menyebabkan penurunan perdagangan satwa ilegal. Sebaliknya, perdagangan tersebut semakin kekurangan kontrol. Dampak lain yang diberikan oleh pandemi adalah meningkatnya permintaan TCM sebagai alternatif dari pengobatan Barat untuk mengatasi penyakit pernapasan yang ditimbulkan oleh virus Covid-19.

Belakangan ini, baik pemerintah maupun perusahaan farmasi melakukan upaya untuk ekspansi pasar TCM ke luar negeri. Usaha tersebut selain dipermudah oleh adanya inisiasi BRI yang berusaha menghubungkan masyarakat dengan masyarakat (*people to people*) di negara anggota, juga dipengaruhi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*/WHO) yang mengakui TCM sebagai ekspor budaya berkembang yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah penyakit dan kesehatan (Zhu & Zhu, 2020: 2). Di pasar domestik, penjualan TCM mengalami pertumbuhan positif dengan memanfaatkan rumah sakit dan toko obat sebagai pusat distribusi.

Meskipun memiliki peluang bisnis yang besar, distribusi TCM dalam pasar luar negeri maupun domestik juga menghadapi tantangan hukum karena komposisinya yang mengandung satwa liar (Tang et al., 2018: 1). Budaya pelestarian TCM menurut Qu (2018: 253) memiliki nilai inti dengan "berorientasi pada manusia". Dengan kata lain, aspek lain di luar itu menjadi tidak terlalu dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan filosofi dan esensi budaya Tionghoa. Oleh sebab itu, tidak menjadi sebuah keanehan mengapa penggunaan satwa liar masih menjadi komponen utama dalam pembuatan TCM hingga saat ini, karena merupakan bagian integral dari budaya Tiongkok dalam memerangi penyakit selama berabad-abad

lamanya. TCM adalah bagian dari peradaban Tiongkok. Berangkat dari penjelasan tersebut, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana keterkaitan perdagangan satwa liar Tiongkok dan Asia Tenggara dengan industri TCM. Dengan demikian, tulisan ini akan berkontribusi dalam studi perdagangan internasional, terutama dalam pembahasan mengenai perdagangan ilegal yang marak terjadi di kawasan perbatasan, sekaligus menjadi kritik atas lemahnya peraturan mengenai perdagangan dan pemanfaatan satwa liar.

KERANGKA KONSEPTUAL

Rantai Nilai Perdagangan Satwa Liar

Kerangka konseptual yang diimplementasikan, seperti pada Figur 1, menggunakan konsep rantai nilai perdagangan dari Wong (2019) untuk menjelaskan keterkaitan antara perdagangan satwa liar dengan TCM. Kemudian, konsep asimetri ekonomi dari tulisan Uhm (2020) digunakan untuk menjelaskan mengapa aktivitas perdagangan ilegal muncul di antara negara berkembang dan negara yang lebih mapan secara ekonomi. Selain itu, konsep pencucian satwa liar (*laundering*) dari Uhm (2018) juga digunakan untuk menjelaskan proses interaksi antara bisnis legal dan ilegal untuk menghindari tuntutan hukum.

Gambar 1. Kerangka Konseptual

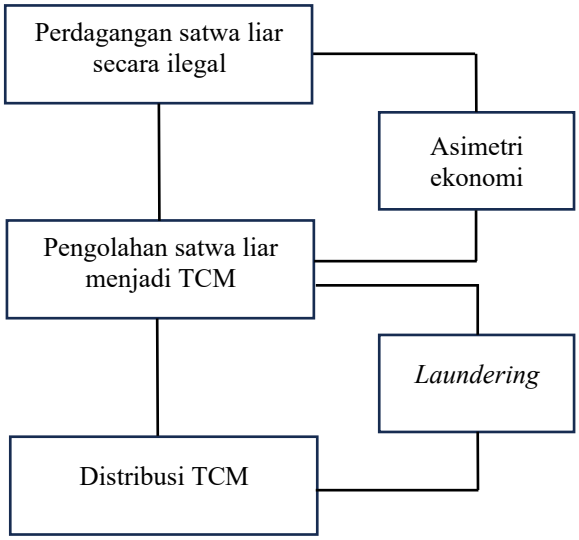

Sumber: Diolah oleh penulis dari Wong (2019) & Uhm (2018 & 2020)

Tulisan Wong (2019: 43) memuat kajian tentang rantai nilai perdagangan global satwa liar yang dihubungkan dengan eksistensi TCM dalam pasar legal. Menurutnya, rantai nilai tersebut dapat dipahami dalam tiga rangkaian proses: tahap pertama melibatkan perburuan dan penyelundupan; tahap kedua adalah proses transformasi satwa menjadi sebuah produk atau komoditas; dan tahap terakhir adalah distribusi produk ke dalam pasar. Perburuan satwa biasanya terjadi di negara-negara berkembang yang kekurangan tata kelola dan pelatihan pencegahan kegiatan ilegal.

Kondisi tersebut memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perburuan.

Asimetri Ekonomi

Analisa konsep asimetri ekonomi oleh Uhm (2020) menjelaskan bahwa perdagangan ilegal muncul karena adanya kesenjangan struktural antara negara asal dengan negara tujuan. Dalam skenario tersebut, pengusaha dalam industri legal maupun ilegal dari negara tujuan mengeksploitasi kemiskinan untuk menarik orang-orang ke dalam aktivitas kriminal. Itulah sebabnya perburuan di Asia Tenggara memiliki kontak erat dengan petani atau pemburu miskin. Budaya eksploitasi tersebut berlanjut hingga ke kawasan lain akibat spesies satwa liar yang tersedia di Asia Tenggara tidak mampu lagi memenuhi tuntutan pasar. Pemburu diberi peralatan untuk melakukan kegiatan kriminal yang menunjukkan bahwa mereka tunduk di bawah tekanan ekonomi. Lebih lanjut, meningkatnya kemakmuran ekonomi di negara tujuan menyebabkan peningkatan daya beli satwa liar. Apa yang dapat dipahami dari penjelasan tersebut adalah faktor ekonomi menyebabkan keberlanjutan dari perburuan dan penyelundupan satwa liar.

Laundering

Pemanfaatan satwa liar di Tiongkok umumnya menghasilkan beberapa jenis produk seperti hiasan furnitur, karpet, makanan, dan yang menjadi pembahasan penting adalah TCM. Menurut Uhm (2019: 115), TCM merupakan bentuk pengobatan tradisional yang sangat mendasar di Tiongkok dengan memanfaatkan satwa liar sebagai komposisi obat. Selain karena efek penyembuhannya yang telah dipercaya sejak ribuan tahun lalu, TCM juga merupakan simbol status, kebudayaan Tionghoa, dan bukti peradaban pengetahuan Tiongkok.

Selama ribuan tahun, spesies hidup dan tidak hidup dianggap sebagai sebuah sumber daya komoditas yang dapat diperdagangkan oleh manusia. Praktik tersebut dapat ditelusuri pada zaman Romawi ketika permintaan akan satwa meningkat untuk tujuan hiburan dalam permainan amfiteater sejak tahun 186 SM. Apa yang dilakukan Tiongkok dengan memanfaatkan satwa liar sebagai bahan pengobatan untuk melawan penyakit juga tidak berbeda dengan praktik yang menyebabkan kepunahan satwa langka. Oleh sebab itu, negara dan lembaga supranasional berperan untuk membentuk regulasi yang dapat membendung aktivitas ilegal tersebut (Ayling, 2013: 58). Di tingkat internasional, CITES disepakati untuk

memastikan bahwa perdagangan internasional flaura dan fauna tidak mengancam kelangsungan hidup spesimen tersebut. Sementara di tingkat nasional, Tiongkok juga memperlakukan Undang-Undang Perlindungan Satwa (*China's Wildlife Protection Law/*WPL).

Akibat kompleksitas bahan yang mengandung satwa liar, perusahaan farmasi di Tiongkok biasanya memanfaatkan celah hukum nasional dan internasional untuk mempermudah bisnisnya. Mengaburkan asal usul illegal dari bahan TCM oleh Uhm (2018) dikenal sebagai aktivitas *laundering.* Pada tahap ini, aturan yang tidak ditegakkan secara maksimal dan kurangnya transparansi menjadi faktor penting yang dapat melegalkan TCM walaupun komposisi pembentuknya mengandung satwa langka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai interaksi antara perdagangan satwa liar di Asia Tenggara dengan industry TCM. Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi literatur pada data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, laporan, dan publikasi resmi lainnya.

PEMBAHASAN

Distribusi Satwa Liar Ke Tiongkok Melalui Asia Tenggara

Asia Tenggara memiliki peran krusial dalam rantai nilai perdagangan satwa liar, yaitu sebagai sumber, pusat distribusi, dan rute transit yang menghubungkan antarkawasan (Farhadinia et al., 2019). Kekayaan dalam keanekaragaman hayati dan kedekatan geografis menjadi nilai strategis yang menjadikan kawasan ini penting bagi aktivitas perdagangan satwa dengan Tiongkok. Sebagai gerbang utama perdagangan gelap dunia, nilai ekonomi dari aktivitas tersebut diperkirakan mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya (Jiao et al., 2021: 2–3). Titik utama perdagangan kawasan terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Segitiga Emas di Laos. Wilayah tersebut merupakan pusat penghasil satwa liar ilegal di Asia Tenggara yang bebas dari penegakan hukum. Selain kawasan Segitiga Emas, masih terdapat pintu perdagangan lain menuju Tiongkok khususnya di negara-negara Mekong, seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Akan tetapi kawasan Segitiga Emas merupakan titik paling krusial karena lemahnya intervensi dari penegak

hukum demi memfasilitasi kepentingan industri dan fungsi ekonomi.

Bennett (2015) berargumen bahwa rendahnya komitmen penegakan hukum dalam kawasan lindung berperan penting dalam masifnya aktivitas penangkapan ilegal terhadap satwa liar yang terancam punah. Kondisi tersebut umumnya dijumpai di negara-negara berkembang yang identik dengan kemiskinan, politik lokal, dan budaya atau kepercayaan yang berperan dalam membentuk praktik perburuan liar. Selain itu, ditemukan adanya hubungan antara peningkatan aktivitas perburuan liar dengan zona konflik dan kelompok bersenjata yang mendiami wilayah tersebut mengumpulkan dana pembelian senjata api melalui eksploitasi satwa liar (Wong, 2019: 43).

Sejalan dengan pemikiran Hughes dan rekan (2020: 530), penting untuk melihat insentif ekonomi sebagai motivasi bagi pelaku perburuan liar, karena sebagian besar pemburu berasal dari keluarga miskin dan kelompok berpenghasilan menengah. Frustrasi yang timbul sebagai akibat dari ketidaksetaraan ekonomi menyebabkan masyarakat setempat bekerja untuk memenuhi permintaan akan satwa liar dari ‘orang luar’. Perusahaan atau kelompok-kelompok kejahatan juga beroperasi dengan memanfaatkan kelemahan struktural yang ada di negara tempatnya beroperasi. Sisi gelap dari kemajuan teknologi transportasi kemudian semakin memperlebar celah mobilisasi perdagangan gelap antarkawasan. Selain terjadi di Asia Tenggara, kondisi serupa juga identik dengan kawasan Asia Selatan dan Afrika sebagai sumber satwa liar yang didistribusikan menuju Tiongkok melalui pintu perdagangan gelap di Kawasan Segitiga Emas.

Sebelum memperluas perburuan liar menuju kawasan lain, Asia Tenggara sebenarnya merupakan sumber satwa liar yang sangat menjanjikan. Kawasan ini dikenal sebagai wilayah geografis paling beragam dengan endemisme spesies tinggi karena mencakup empat *hotspot* keanekaragaman hayati di dunia, yaitu: Indo-Burma, Sundaland, Filipina, dan Wallacea. Akan tetapi, Asia Tenggara juga dikenal memiliki tingkat kepunahan spesies tertinggi dibandingkan kawasan lain secara global sehingga menimbulkan istilah “sindrom hutan kosong” (*empty forest syndrome*).

Gambar 2. Asia Tenggara sebagai Pusat Perdagangan Satwa Liar ke Tiongkok

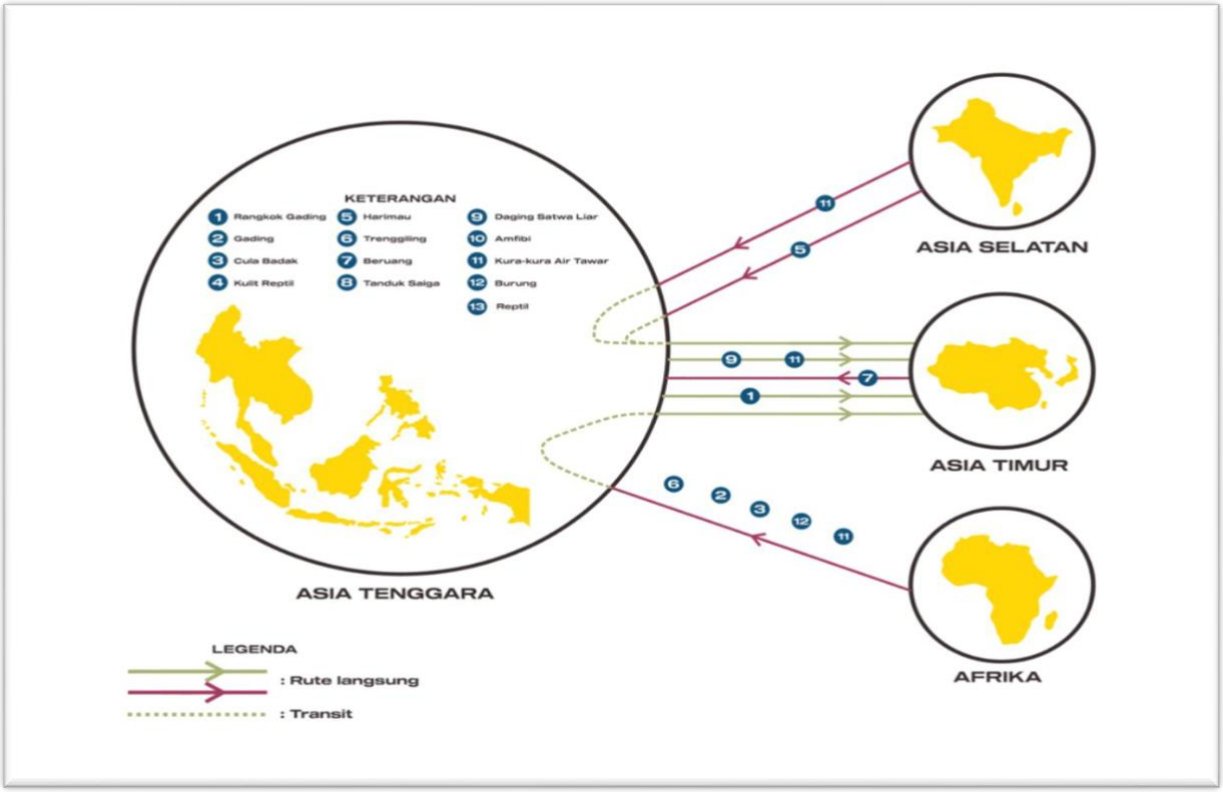

Sumber: diadaptasi dari Krishnasamy & Zavagli (2020).

Ancaman tersebut timbul sebagian kecil dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi dan populasi yang menyebabkan hilangnya habitat satwa. Selain itu, setidaknya 70 persen penurunan habitat alami disebabkan oleh aktivitas perburuan satwa. Akibatnya, untuk memenuhi permintaan satwa liar dalam pasar gelap, Tiongkok memperluas jangkauannya hingga ke kawasan lain seperti Asia Selatan dan Afrika (Krishnasamy & Zavagli, 2020: 10).

Berdasarkan data pada Figur 2, dapat diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan terhadap satwa, Tiongkok bergantung pada Asia Tengara sebagai pusat distribusi dan gerbang utama perdagangan ilegal. Sebagai bahan utama pembuatan obat tradisional (TCM), penurunan populasi trenggiling di Asia Tenggara sebesar 90 persen menyebabkan peningkatan perburuan trenggiling di Afrika sejak sejak tahun 2001 sebagai sumber subtitusi. Hingga tahun 2019, volume penjualan trenggiling dari Asia dan Afrika diperkirakan mencapai 895.000 ekor, dengan mayoritas penjualan trenggiling secara konsisten berpusat di Laos. Selain

trenggiling, harimau yang berasal dari Asia Selatan juga menjadi komponen penting dalam pembuatan TCM (Krishnasamy & Zavagli, 2020: 28 & 31).

Aktivitas perdagangan satwa ilegal dari Asia Tenggara tidak terlepas dari pengaruh migrasi penduduk Tionghoa sejak abad ke-6 akibat perang, kelaparan, dan korupsi di Tiongkok (Nooren & Gordon, 2001: 17). Berabad-abad sebelumnya, negara-negara Asia Tenggara yang berada di sepanjang Jalur Sutra khususnya di Laos dan Myanmar menjadi tujuan utama migrasi. Dengan merekrut masyarakat adat setempat untuk melakukan perburuan, perdagangan ilegal tersebut dijalankan oleh etnis Tionghoa yang memanfaatkan komunitasnya untuk membangun relasi. Hal ini mengilustrasikan bahwa jaringan perdagangan ilegal difasilitasi oleh kesamaan etnis, kewarganegaraan, atau bahasa (Uhm, 2019: 121).

Perlu diketahui bahwa maraknya aktivitas perdagangan ilegal di kawasan menggerakkan Tiongkok dan ASEAN untuk memperkuat komitmen dalam memerangi perdagangan satwa melalui implementasi CITES. Hal ini melahirkan perjanjian di level bilateral dan multilateral, forum regional, dan penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan penegakan hukum transnasional. Dalam kerangka *'ASEAN Plus China'* dan *'ASEAN Plus Three',* negara-negara anggota mengadopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Satwa Liar pada KTT Asia Timur ke-9. Deklarasi tersebut mengakui dampak multifaset yang ditimbulkan oleh perdagangan ilegal flaura dan fauna, serta kebutuhan mendesak antarlembaga untuk mengambil tindakan melalui dialog, harmonisasi undang-undang, dan pengembangan gugus tugas untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, telah diadakan konsultasi tahunan melalui Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN dan Tiongkok (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/*AMMTC) dan dalam format *Plus Three* tentang kejahatan transnasional. Rencana kerja pemberantasan ancaman keamanan non tradisional dikembangkan setiap lima tahun. Inti dari kerangka kerja yang dikembangkan adalah kerja sama di bidang intelijen, pelacakan kejahatan, pertukaran dan pelatihan, pengumpulan bukti, serta penangkapan dan penyelidikan buronan kriminal. Meski tidak menyebutkan perdagangan satwa liar secara eksplisit, aktivitas perdagangan ilegal tersebut dimuat dalam lingkup AMMTC *Plus Three* pada tahun 2017 yang menekankan perlunya memperluas dan memperdalam kerja sama

untuk mengatasi bentuk-bentuk kejahatan transnasional termasuk perdagangan satwa liar dan kayu (Jiao et al., 2021: 8).

Keterbukaan ekonomi yang dikombinasikan dengan sistem desentralisasi dan privatiasi membuka kesempatan bagi pengusaha di industri ilegal melenggangkan bisnisnya dengan lebih sedikit hambatan. Sejalan dengan argumen tersebut, Uhm (2019: 118) menyatakan bahwa BRI memberi ruang bagi munculnya aktor baru di sektor perdagangan formal dan informal. Keberadaan pandemi Covid-19 yang telah membatasi pergerakan aktivitas manusia juga tidak mampu membendung laju perdagangan ilegal. Menurut Fukushima et al. (2021: 2), tidak ada bukti yang jelas bahwa volume perdagangan satwa menurun selama pandemi. Sebaliknya, perburuan liar tercatat mengalami peningkatan di beberapa bagian dunia. Oleh sebab itu, jeda operasional yang diharapkan tercipta selama pandemi justru memberi tambahan pasokan satwa liar yang akan diperdagangkan secara ilegal (Wittig, 2020).

Tantangan utama terkait sulitnya mengatasi perdagangan satwa liar berkaitan erat dengan metode operasionalnya. Meski terdapat peraturan internasional yang mengatur tentang kejahatan perdagangan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar umumnya beroperasi di bawah bayangan perdagangan legal melalui perusahaan yang terdaftar secara resmi untuk menghindari tuntutan hukum (Uhm, 2019: 123). Argumen Zhang & Chin (2008) tentang perusahaan kriminal transnasional Tiongkok tampaknya sejalan dengan pernyataan tersebut:

> "*If the Chinese economy can be viewed as a dragon roaring and blazing throughout the world, transnational criminal enterprises of Chinese origin are also thriving in its wake….*" (Uhm & Wong, 2021: 487).

Kings Romans International Ltd. yang merupakan perusahaan Tiongkok berbasis di Hong Kong merupakan bukti adanya aktivitas perdagangan satwa liar secara ilegal yang berlindung di bawah aktivitas legal perusahaan, yaitu bisnis kasino. Bisnis tersebut beroperasi di Kawasan Segitiga Emas di Laos yang menjadi episentrum perdagangan satwa liar Asia Tenggara menuju Tiongkok, khususnya untuk satwa trenggiling dan harimau yang didatangkan dari Afrika dan Asia Selatan. Selain karena berlokasi di kawasan perdagangan bebas, perlindungan yang diberikan pemerintah Laos melalui hak sewa lahan selama 99 tahun kepada Kings Romans memungkinkan perusahaan tersebut mengoperasikan pasar

satwa liar. Kawasan bebas hukum ini juga dikenal sebagai '*Little China'* karena aktivitas bisnis dijalankan menggunakan mata uang dan zona waktu Tiongkok (Wong, 2021: 207–208).

Jelas bahwa pelaku perdagangan satwa liar tersebut melakukan diversifikasi bisnis dari aktivitas kejahatan transnasional utamanya, yaitu perdagangan narkoba dan pencucian uang. Faktor historis orang-orang Tionghoa yang bermigrasi ke wilayah tersebut mendasari suburnya investasi yang datang dari pengusaha ataupun kelompok kejahatan lain yang berasal dari Tiongkok (Uhm & Wong, 2021: 491). Dengan berlindung di bawah operasi bisnis kasino, perdagangan satwa liar menuju Tiongkok yang dijalankan oleh Kings Romans terbebas dari intervensi hukum internasional maupun hukum nasional Laos terkait perlindungan dan perdagangan flora dan fauna. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sulitnya penanganan perdagangan satwa ilegal antara Asia Tenggara dan Tiongkok ditengarai oleh metode operasi bawah tanah yang diterapkan di bawah payung bisnis legal serta lemahnya kekuatan hukum yang mengatur.

Pemanfaatan Satwa Liar Sebagai Bahan Utama TCM

Sejak era Kaisar Kuning, Tiongkok dikenal aktif memanfaatkan satwa liar sebagai bahan penting dalam pembuatan TCM. Aktivitas tersebut masih berlangsung hingga kini dalam skala yang lebih besar, menyebabkan kelangkaan satwa liar di Tiongkok sehingga perburuan digerakkan hingga ke kawasan lain, yaitu Asia Tenggara. Namun masalah kelangkaan serupa kemudian terjadi juga di Asia Tenggara sehingga para pemasok satwa liar memperluas jangkauannya hingga ke Afrika dan Asia Selatan.

Peningkatan aktivitas perdagangan satwa liar dengan Tiongkok berhubungan dengan semakin tingginya permintaan TCM yang merupakan bagian dari praktik pengobatan mendasar yang dipercaya khasiatnya sejak berabad-abad lamanya (Uhm, 2019: 115). Selain efek penyembuhannya, mengosumsi TCM merupakan simbol status dan kebanggaan budaya Tiongkok. Semakin kuat, berbahaya, dan langka spesies tersebut, semakin besar khasiat yang diberikan (Nooren & Gordon, 2001). Peningkatan kemakmuran ekonomi Tiongkok juga turut berkontribusi pada tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli TCM dari satwa liar yang terancam punah. Kelas ekonomi menengah bermunculan setelah penurunan inflasi tajam

tahun 1995 dan 1999 (Uhm, 2020: 535). Ekspansi daya beli tersebut berkontribusi pada pertumbuhan skala dan ruang lingkup perdagangan satwa liar secara global, terutama antara Tiongkok dan Asia Tenggara melalui Kawasan Segitiga Emas (Wong, 2019: 1–2).

Satwa yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan TCM adalah harimau, badak, kijang saiga, dan trenggiling. Pertama, harimau yang digunakan sebagai bahan terpenting dalam TCM adalah tulang. Bagian tubuh tersebut dimanfaatkan untuk pengobatan luka luar, bisul, sakit perut, malaria, demam tifoid, hidrofobia, kram otot, nyeri sendi dan tulang, serta rematik. Akibat perburuan liar untuk TCM, tiga dari sembilan subspesies harimau telah menghilang selama abad terakhir.

Kedua, badak merupakan salah satu bahan pembuatan TCM yang sangat populer. Cula badak dihaluskan dan diolah menjadi obat untuk meredakan demam, eritema, purpura, kejang, kram, mimisan, dan penyakit jantung. Klaim dari Vietnam juga menyatakan bahwa cula badak berkhasiat untuk menyembuhkan kanker. Akibatnya permintaan obat dari satwa ini terus meningkat dan menyebabkan kelangkaan di Afrika.

Ketiga, pemanfaatan kijang saiga dimulai pada tahun 1993 akibat penurunan populasi badak. Bagian tubuh yang digunakan untuk pembuatan TCM adalah tanduknya yang bermanfaat untuk detoksifikasi, meredakan epilepsi, dan mengatasi penyakit yang berkaitan dengan hati. Akibat dari perburuan kijang saiga, populasi jantan dan betina menjadi tidak seimbang karena pemanfaatannya untuk TCM terbatas pada jantan muda bertanduk.

Keempat, yang paling populer adalah trenggiling. Bagian sisiknya dihaluskan menjadi bubuk untuk meningkatkan sirkulasi darah, merangsang sekresi susu, dan mengurangi infeksi serta pembengkakan kulit. Populasi trenggiling secara global diperkirakan menurun sebanyak 30 persen akibat perburuan liar (Uhm, 2019: 116-118). Sebagai bahan dasar penting dalam TCM, perdagangan satwa-satwa ini juga masih terus dilakukan di berbagai kawasan dengan Tiongkok sebagai pasar tujuan paling populer. Di Kawasan Segitiga Emas Laos yang dikelola oleh Kings Romans, dua jenis satwa yang sering diperdagangkan secara ilegal adalah harimau dan trenggiling.

Penggunaan spesies langka dalam TCM bagaimanapun merupakan tindakan ilegal. Beberapa kandungan TCM yang

beredar masih mengandung unsur hewani dari spesies yang terancam punah meskipun telah dikriminalisasi. Tiongkok meratifikasi CITES pada tahun 1981 dan menerapkannya dalam kerangka WPL. Aturan tersebut menyatakan bahwa spesies satwa yang diburu, ditangkap, atau dibunuh dilarang untuk diperjual belikan. Pada tahun 1993, Dewan Negara memperbarui peraturan nasional dengan melarang penjualan, pengangkutan, pembelian, pengiriman, pembuatan, serta impor dan ekspor TCM yang mengklaim kandungan spesies satwa langka (Uhm, 2019: 115–119). Aturan ini kembali direvisi sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 2009 hingga 2018. Hasil akhir diterbitkan pada Februari 2020 dengan memberikan kelonggaran bagi pemanfaatan satwa liar untuk TCM. Dalam pasal 27 WPL, penjualan, pembelian, atau pemanfaatan satwa liar dapat disetujui oleh pemerintah tingkat provinsi untuk penelitian ilmiah, penangkaran, pameran publik, konservasi warisan, dan tujuan khusus lainnya. Kemudian dalam pasal 298 WPL disebutkan bahwa produk satwa liar hasil penangkaran dapat diperdagangkan secara komersial sesuai dengan ketentuan izin dan kuota dari pemerintah (White, 2021: 2).

Ketika Covid-19 menyebar, pemerintah Tiongkok kembali memperketat WPL untuk melarang perdagangan dan konsumsi makanan dari satwa liar. Peraturan tersebut didasari oleh penyebaran pertama virus Covid-19 yang terdeteksi di Pasar Huanan Luhan. Meski penerapan aturan ini lebih ketat dibanding peraturan-peraturan perdagangan satwa sebelumnya, larangan ini hanya dimaksudkan untuk mengatur konsumsi satwa liar untuk mencegah penyakit zoonosis (Huang et al., 2021: 1–2).

Distribusi TCM Dalam Skala Domestik dan Internasional

Pengobatan tradisional Tiongkok telah dikenal sejak lebih dari 5000 tahun lalu sebagai hasil budaya dan kecerdasan masyarakat dalam melawan penyakit. Pada tahun 2016, perawatan TCM menyumbang 15,8 persen dari total layanan medis atau setara dengan 962 juta pasien yang menggunakan pengobatan tersebut dari klinik dan rumah sakit. Sejak tahun 1996, pemerintah telah memperkenalkan cita-cita internasionalisme TCM yang mengusung dua aspek utama, yaitu: mempromosikan pengembangan perdagangan internasional yang berkelanjutan melalui perluasan volume perdagangan dan mendorong pengambangan TCM yang berkelanjutan di bawah perlindungan hukum untuk memudahkan ekspansi ke luar negeri. Akan tetapi, upaya

internasionalisasi tersebut sempat mengalami tantangan pada tahun 2016 yang ditunjukkan dengan pertumbuhan negatif ekspor TCM sebesar 9,13 persen dari tahun 2015 (Lin et al., 2018: 1–2).

Dua pasar terbesar TCM di luar negeri adalah Amerika Serikat dan Jepang. Penurunan ekspor ke Amerika Serikat diakibatkan oleh kendala persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Food and Drug Administration*/FDA) yang membutuhkan modal besar dan waktu yang sangat lama. Kendala tersebut datang dari pertimbangan Amerika Serikat untuk memanfaatkan senyawa nabati sebagai obat terapi. Sementara itu, kendala ekspor ke Jepang disebabkan oleh persaingan dengan obat tradisional lokal di negara tersebut. Obat tradisional yang diproduksi secara lokal di Jepang telah menguasai pasar akibat penerapan standar yang lebih ketat. Menurut Lin dan rekan (2018), banyak negara maju telah menerapkan hambatan teknis perdagangan hijau yang tinggi sehingga menghambat internasionalisasi TCM.

Upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar TCM tidak lantas berhenti setelah menghadapi banyak hambatan teknis. Megaproyek BRI yang diinisiasi sejak tahun 2013 memiliki peran penting dalam mendukung ambisi kesehatan Tiongkok. BRI diproyeksikan untuk menghubungkan Tiongkok ke lebih dari 130 negara dan menciptakan jaringan yang menghubungkan 62 persen dari total populasi dunia.

Proyek infrastruktur tersebut memiliki lima tujuan utama, yaitu membangun hubungan antara Tiongkok dan negara-negara BRI; koordinasi kebijakan; menghilangkan hambatan perdagangan; intergrasi sistem keuangan; dan mengembangkan hubungan antar masyarakat (*people to people*) yang lebih erat. Tujuan terakhir tersebut merujuk pada pertukaran budaya, pendidikan, pariwisata, dan bidang-bidang kesehatan yang secara khusus dimaksudkan untuk ekspor TCM.

Empat tahun setelah pengumuman BRI, sebanyak 43 pusat kerja sama TCM di 35 negara telah disepakati dan terdapat peningkatan dalam penjualan TCM sebesar 54 persen di negara-negara BRI. Setelah pencapaian besar tersebut, Tiongkok berencana memperluas kerja sama ke wilayah BRI baru, terutama di Eropa dan Timur Tengah (Hinsley et al., 2019).

Tahun 2019 merupakan tonggak sejarah dalam internasionalisasi TCM karena WHO dalam pertemuan negara-negara anggota mengadopsi revisi ke-11 dari

Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD-11) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Sistem ICD untuk pertama kalinya mengakui nilai TCM dalam pengelolaan penyakit dan masalah terkait kesehatan untuk negara-negara anggotanya. Bukti terbaru terdokumentasi pada saat krisis kesehatan Covid-19, yakni TCM dinilai memiliki integrasi efektif dengan pengobatan Barat dalam mengobati sindrom pernapasan akut, virus influenza, HIV/AIDS, serta penyakit tenggorokan dan mulut. Data WHO menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dunia telah mengonsumsi TCM yang tersebar di 183 negara. Implementasi ICD-11 semakin mendorong perluasan pasar TCM secara global (Lam et al., 2019: 373–376).

Di dalam negeri, TCM memegang porsi yang cukup besar dalam industri farmasi Tiongkok dengan menyumbang 31 persen dari pasar domestik pada tahun 2016 dan meningkat drastis sebesar 20 persen pada tahun 2017. Perusahaan farmasi seperti Kangmei Pharmaceutical, China Traditional Medicine Holdings, Tong Ren Tang, dan sebanyak hampir 200 perusahaan lainnya memanfaatkan celah regulasi nasional untuk memanfaatkan satwa liar dalam proses produksinya. Rumah sakit dan toko-toko obat kemudian menjadi pusat distribusi berbasis resep untuk menyempurnakan rantai pasok TCM di dalam negeri. Sebanyak 66 produk TCM pada tahun 2016 diverifikasi mengandung trenggiling dan membutuhkan sekitar 400-ton sisik trenggiling setiap tahunnya. Dalam beberapa kasus juga ditemukan kandungan tulang harimau dalam TCM yang didistribusikan secara nasional (Horton, 2020: 37).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, trenggiling dan harimau merupakan dua spesies satwa yang dilarang pemanfaatannya untuk pembuatan obat sesuai dengan ketentuan CITES. Namun aturan nasional Tiongkok memberi kelonggaran bagi para produsen TCM untuk memanfaatkan celah regulasi dalam menutupi aspek ilegal dalam bisnisnya.

Pemerintah Tiongkok sejak tahun 2003 telah menerapkan mekanisme label "*China National Wildlife Mark*" (CNWM) yang mewajibkan produsen TCM menyertakan keterangan CNWM pada kemasan produk. Aturan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan satwa langka seperti trenggiling dan harimau masih diizinkan di bawah pengawasan pemerintah (White, 2021). Berdasarkan WPL terbaru, satwa liar yang diizinkan pemanfaatannya adalah yang berasal dari penangkaran. Alasan yang digunakan oleh perusahaan farmasi adalah produk tersebut dibuat dengan

memanfaatkan stok satwa liar dari tahun 1960-an. Akan tetapi, tingginya permintaan terhadap TCM mengindikasikan sulitnya untuk memenuhi permintaan berkelanjutan apabila mengandalkan satwa dari penangkaran. Hingga saat ini, belum ada bukti temuan keberhasilan penangkaran komersil di Tiongkok (Wang et al., 2020: 904).

Sementara distribusi di dalam negeri diwarnai dengan usaha ilegal untuk melegalkan sumber satwa dalam pembuatan TCM, di luar negeri perusahaan farmasi bergerak melalui investasi langsung dengan mengalihkan beberapa sumber produksi ke pasar konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan volume pasokan. Selain itu, strategi tersebut dimaksudkan untuk menghindari aturan CITES yang hanya berlaku untuk perdagangan internasional. Pengawasan CITES tidak mencakup legalitas perdagangan, yang sumber pasokan dan produksi berada di negara yang sama (Hinsley et al., 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka keterkaitan antara perdagangan satwa ilegal Tiongkok dan Asia Tenggara dengan pengembangan TCM dapat dilihat dari rantai nilai perdagangannya. Perburuan dan penyelundupan satwa secara ilegal berada di tahap pertama rantai nilai, dengan perusahaan kriminal transnasional yang beroperasi di Laos mendistribusikan satwa yang diperoleh dari Asia Selatan dan Afrika menuju Tiongkok. Pada rantai nilai tahap kedua, satwa liar yang berhasil memasuki Tiongkok diolah oleh perusahaan farmasi sebagai komposisi utama TCM. Satwa ilegal yang diselundupkan melalui pintu Kawasan Segitiga Emas adalah trenggiling dan harimau yang keduanya dipercaya memiliki khasiat yang kuat dalam pengobatan.

Tahap terakhir, yaitu distribusi TCM. Pada tahap ini pelaku bisnis farmasi di Tiongkok memanfaatkan celah hukum dengan menggunakan alibi bahwa stok satwa yang digunakan berasal dari penangkaran. Kenyataannya, permintaan TCM yang begitu tinggi mengindikasikan bahwa butuh lebih banyak satwa untuk memenuhi kebutuhan pasar. Distribusi TCM di dalam negeri dilakukan melalui toko-toko obat dan rumah sakit. Sementara itu, distribusi TCM ke luar negeri mengalami kendala karena tingginya hambatan teknis perdagangan hijau yang diterapkan negar-negara pasar. Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut,

perusahaan-perusahaan farmasi Tiongkok memindahkan produksinya ke wilayah yang dekat dengan pasar dan sumber bahan untuk menghindari tekanan CITES. Distribusi TCM ke luar negeri semakin dipermudah dengan adanya BRI dan pengakuan WHO melalui ICD-11.

REFERENSI

Ayling, J. (2013). What Sustains Wildlife Crime? Rhino Horn Trading and the Resilience of Criminal Networks. *Journal of International Wildlife Law and Policy*, *16*(1), 57–80. https://doi.org/10.1080/13880292.2013.764776

Bennett, E. L. (2015). Another Inconvenient Truth: The Failure of Enforcement System to Save Charismatic Species. In *Protecting the Wild: Parks and Wilderness, the Foundation for Conservation*. Foundation for Deep Ecology.

Chi, M. (2021). Regulation of Special Economic Zones Through Regional Trade Agreements: Confronting the Synergy Issue. *Journal of International Economic Law*, *24*(2), 423–442. https://doi.org/10.1093/jiel/jgab016

Farhadinia, M. S., Maheshwari, A., Nawaz, M. A., Ambarlı, H., Gritsina, M. A., Koshkin, M. A., Rosen, T., Hinsley, A., & Macdonald, D. W. (2019). Belt and Road Initiative may create new supplies for illegal wildlife trade in large carnivores. In *Nature Ecology and Evolution* (Vol. 3, Issue 9, pp. 1267–1268). Nature Publishing Group. https://doi.org/10.1038/s41559-019-0963-6

Fukushima, C. S., Tricorache, P., Toomes, A., Stringham, O. C., Rivera-Téllez, E., Ripple, W. J., Peters, G., Orenstein, R. I., Morcatty, T. Q., Longhorn, S. J., Lee, C., Kumschick, S., de Freitas, M. A., Duffy, R. V., Davies, A., Cheung, H., Cheyne, S. M., Bouhuys, J., Barreiros, J. P., Cardoso, P. (2021). Challenges and perspectives on tackling illegal or unsustainable wildlife trade. In *Biological Conservation* (Vol. 263). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109342

Hinsley, A., Milner-Gulland, E. J., Cooney Rosie, Timoshyna, A., Ruan, X., & Lee, T. M. (2019). Building Sustainability into the belt and Road Initiative's Traditional Chinese Medicine Trade. *Nature Sustainability*, *3*, 96–100.

Horton, B. A. (2020). *An Analysis of the Impacts of China's Belt and Road Initiative on African Pangolin Conservation*.

Huang, Q., Wang, F., Yang, H., Valitutto, M., & Songer, M. (2021). Will the Covid-19 outbreak be a turning point for China's wildlife protection: New developments and challenges of wildlife conservation in China. *Biological Conservation*, *254*. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108937

Hughes, A. C., Lechner, A. M., Chitov, A., Horstmann, A., Hinsley, A., Tritto, A., Chariton, A., Li, B. V., Ganapin, D., Simonov, E., Morton, K., Toktomushev, K., Foggin, M., Tan-Mullins, M., Orr, M. C., Griffiths, R., Nash, R., Perkin, S.,

Glémet, R., Yu, D. W. (2020). Horizon Scan of the Belt and Road Initiative. In *Trends in Ecology and Evolution* (Vol. 35, Issue 7, pp. 583–593). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.tree.2020.02.005

Jiao, Y., Yeophantong, P., & Lee, T. M. (2021). Strengthening International Legal Cooperation to Combat the Illegal Wildlife Trade Between Southeast Asia and China. *Frontiers in Ecology and Evolution*, *9*. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.645427

Krishnasamy, K., & Zavagli, M. (2020). *Southeast Asia at the Heart of Wildlife Trade*.

Lam, W. C., Lyu, A., & Bian, Z. (2019). ICD-11: Impact on Traditional Chinese Medicine and World Healthcare Systems. *Pharmaceutical Medicine*, *33*(5), 373–377. https://doi.org/10.1007/s40290-019-00295-y

Lin, A. X., Chan, G., Hu, Y., Ouyang, D., Ung, C. O. L., Shi, L., & Hu, H. (2018). Internationalization of traditional Chinese medicine: Current international market, internationalization challenges and prospective suggestions. In *Chinese Medicine (United Kingdom)* (Vol. 13, Issue 1). BioMed Central Ltd. https://doi.org/10.1186/s13020-018-0167-z

Nooren, H., & Gordon, C. (2001). *Wildlife Trade in Laos: The End of the Game*. Netherlands Committee for IUCN.

Qu, Q. (2018). A Study on the "Going out" Paths of Tourism Industry of TCM Health Preservation Culture Driven by One Belt, One Road. *Advances in Social Scince, Education and Humanities Research*, *250*.

Tang, H., Huang, W., Ma, J., & Liu, L. (2018). SWOT analysis and revelation in traditional Chinese medicine internationalization. In *Chinese Medicine (United Kingdom)* (Vol. 13, Issue 1). BioMed Central Ltd. https://doi.org/10.1186/s13020-018-0165-1

Uhm, D. V. (2018). Wildlife and Laundering: Interaction between the Under and Upper World. In *Green Crimes Dirty Money*. Routledge.

Uhm, D. V. (2019). Chinese Wildlife Trafficking Networks along the Silk Road. In *Organized Crime and Corruption Across Borders*. Routledge.

Uhm, D. V. (2020). Wildlife Trafficking and Criminogenic Asymmetries in a GlobaliZed World. In *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Routledge.

Uhm, D. V., & Wong, R. W. Y. (2021). Chinese organized crime and the illegal wildlife trade: diversification and outsourcing in the Golden Triangle. *Trends in Organized Crime*, *24*(4), 486–505. https://doi.org/10.1007/s12117-021-09408-z

Wang, Y., Turvey, S. T., & Leader-Williams, N. (2020). Knowledge and attitudes about the use of pangolin scale products in Traditional Chinese Medicine (TCM) within China. *People and Nature*, *2*(4), 903–912. https://doi.org/10.1002/pan3.10150

White, A. (2021). How China's Wildlife Trade Legislation Permits Commercial

Trade in Protected Wild Animal Species. *China Quarterly*, *248*(1), 1212–1225. https://doi.org/10.1017/S0305741021000485

Wittig, T. (2020). *How will COVID-19 impact global wildlife trafficking?* www.unitedforwildlife.org

Wong, R. W. Y. (2019). *The Illegal Wildlife Trade in China: Understanding the Distribution Networks*. Springer Nature Switzerland AG. http://www.palgrave.com/gp/series/14622

Wong, R. W. Y. (2021). Shadow operations in wildlife trade under China's Belt and Road Initiative. *China Information*, *35*(2), 201–218. https://doi.org/10.1177/0920203X20948680

Zhang, S. X., & Chin, K. L. (2008). Snakeheads, mules, and protective umbrellas: A review of current research on Chinese organized crime. *Crime, Law and Social Change*, *50*(3), 177–195. https://doi.org/10.1007/s10611-008-9136-2

Zhu, A., & Zhu, G. (2020). Understanding China's wildlife markets: Trade and tradition in an age of pandemic. In *World Development* (Vol. 136). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105108